

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TAWURAN PELAJAR (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang)

Anis Boehari
Universitas Primagraha
Serang, Indonesia
anis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang fenomena tawuran pelajar SMK PGRI 1 Kota Serang yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menimbulkan banyak kerugian, berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah dan orang tua namun tawuran pelajar masih terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran kepolisian setempat dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tawuran antar pelajar, dan peran lembaga kepolisian kecamatan kota Serang dalam upaya mengatasi tawuran pelajar serta kesulitan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif tipe studi kasus dengan lokasi penelitian di SMK PGRI 1 Kota Serang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tawuran antarpelajar di SMK PGRI 1 Kota Serang (a) disebabkan oleh faktor psikologis, lingkungan keluarga yang tidak kondusif, kurangnya penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis agama, tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik, serta pengaruh teman sebaya terhadap perilaku negatif. (b) Upaya yang dilakukan kepolisian kecamatan kota Serang mengutamakan upaya preventif. berupa penyuluhan, meningkatkan razia di tempat-tempat keramaian pada saat jam belajar, meningkatkan kerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat. Selain itu melakukan upaya represif meliputi mengagalkan dan membubarkan dengan cara paksa bila sedang terjadi tawuran pelajar, dan mengamankan para siswa yang melakukan tawuran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Langkah selanjutnya memanggil pihak orang tua, pihak sekolah dan perwakilan dari tokoh masyarakat untuk mendamaikan keduanya. (c).Kendala yang dihadapi pihak kepolisian kurangnya jumlah personil, minimnya saranan dan prasarana, serta lemahnya perangkat hukum untuk memberikan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tawuran Pelajar

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of student brawls of SMK PGRI 1 Serang City which disrupt public order and security and cause a lot of losses, various efforts have been made by the school and parents but student brawls still occur. Therefore, the role of the local police in overcoming these problems is needed. This study aims to determine the causes of brawls between students, and the role of the Serang city sub-district police in an effort to overcome student brawls and the difficulties they face. The approach used is a qualitative approach with a descriptive method of case study type with the research location at SMK PGRI 1 Serang City. Data was collected using interview guides, field observations and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and data verification. The results of the study concluded that the brawls between students at SMK PGRI 1 Serang City (a) were caused by psychological factors, a family environment that was not conducive, the lack of

inculcation of religious-based character values, not being able to use free time properly, and the influence of peers on negative behavior. (b) Efforts made by the Serang city sub-district police prioritize preventive efforts. in the form of counseling, increasing raids in crowded places during study hours, increasing cooperation with schools and the community. In addition, carrying out repressive efforts include thwarting and disbanding by force when a student brawl is taking place, and securing students who are doing brawls to account for their actions. The next step is to call the parents, the school and representatives from community leaders to reconcile the two. (c). The obstacles faced by the police are the lack of personnel, the lack of facilities and infrastructure, and the weakness of legal instruments to provide firm sanctions.

Keywords: Police Role, Student Brawl

PENDAHULUAN

Tidak sedikit pelajar yang menganggap tawuran merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh para remaja masa kini, hal ini dikarenakan kondisi usia dari kebanyakan pelaku tawuran tersebut yang masih ingin menunjukkan jati dirinya. Para pelaku ini kebanyakan tergolong kedalam usia muda, atau dapat kita sebut sebagai “pemuda”. Permasalahan tawuran kini telah meluas ruang lingkupnya ke dalam lingkup kriminalitas. Hal ini karena dalam sebuah fenomena sosial pasti terdapat efek beruntun ataupun efek bersamaan. Biasanya tawuran ini pada umumnya terjadi akibat fanatisme para remaja yang berlebihan terhadap terhadap almamater. Faktor lain juga muncul akibat adanya bentuk solidaritas semu dikalangan para remaja, Tawuran antar pelajar semakin menjadi semenjak terciptanya gang-gang sekelompok anak sekolah yang ada di sekolah tersebut. Kasus kekerasan dikalangan pelajar semakin nekad dan mengarah pada tindak pidana, seperti kasus baku hantam siswa telah menggunakan senjata tajam nyaris menimbulkan korban jiwa. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatannya bisa mengganggu ketenangan, ketertiban. bahkan menimbulkan kerugian masyarakat sekitar. Berbagai segmen masyarakat berusaha mengidentifikasi penyebab aksi-aksi tawuran pelajar yang dari hari kehari tak pernah kunjung berahir dan berbagai pemikiran para ahli dikemukakan sebagai bentuk usaha mencari solusi penyelesaiannya, Di dalam teori Emile Durkheim, dalam Anwar, Yesmil dan Adang. (2013:93).

disebutkan terdapat dua kelompok sosial. Yaitu kelompok sosial yang bersolidaritas mekanik dan kelompok sosial yang bersolidaritas organik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa: Kelompok sosial yang bersolidaritas mekanik ialah kelompok yang mengutamakan persamaan perilaku dan sikap sehingga suatu perbedaan tidak dibenarkan didalam kelompok ini. Kesadaran kolektif pada kelompok ini merupakan kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan kelompok yang sifatnya memaksa sehingga bisa mempersatukan semua anggota kelompok agar menjadi *equilibrium* (seimbang). Kelompok sosial yang bersolidaritas organik ialah kelompok yang mengikat masyarakat yang lebih kompleks. Terdapat banyak perbedaan sehingga anggota kelompok hanya mau bekerja untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam kelompok ini, terdapat spesifikasi masyarakat yang lebih rinci dan dipersatukan oleh saling tergantungnya antar bagian dalam masyarakat tersebut. Tidak berfungsinya salah satu bagian akan membuat kelompok bersolidaritas organik menjadi *disequilibrium* (Tidak seimbang). Jika kita melihat dari teori kelompok berbasis solidaritas diatas, ternyata di SMK PGRI 1 Kota Serang itu terdapat dua buah solidaritas. Yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekaniknya dapat kita lihat di dalam sekolah, anggota-anggota sekolah memiliki kesadaran dan tujuan yang sama, yaitu membuat SMK PGRI 1 Kota Serang menjadi kuat dan ditakuti oleh sekolah lain. Disitu terlihat

ikatan yang mengutamakan persamaan perilaku dan sikap. Sedangkan solidaritas organiknya dapat kita lihat di tingkat kabupaten dan kota Serang terdapat banyak SMK. dan SMU, namun SMK. Dan SMU tersebut sama sekali tidak akrab, malah tawuran. Tawuran antar pelajar merupakan sebuah konflik dan masalah sosial dan secara psikologis, tawuran pelajar digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam dua jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Jika melihat dari berbagai macam teori yang di kemukakan oleh para ahli yang kontens terhadap berbagai macam problematika kehidupan remaja, lebih khusus yang erat kaitannya dengan masalah yang berhubungan dengan tawuran pelajar, ternyata cukup signifikan dengan masalah tawuran pelajar yang terjadi di wilayah Kota Serang lebih khusus di SMK PGRI 1 Kota Serang. Maraknya tawuran pelajar ini selalu membawa korban mulai dari luka ringan sampai harus membutuhkan perawatan di rumah sakit. Meski ada dampak buruk akibat kekerasan yang mereka lakukan, namun tampak belum adanya titik terang untuk dan berhenti. Dugaan sementara dari peneliti, kasus yang terjadi di SMK PGRI 1 penyebabnya hampir mirip dengan sekolah-sekolah yang ada diluar kota Serang yaitu adanya fanatisme berlebihan sehingga menimbulkan jargon bahwa sekolah mereka yang terbaik dan kuat, Faktor lain yang menjadi penyebab tawuran di wilayah ini karena terciptanya geng C55 yang

dibanggakan oleh kelompoknya. Faktor lain sering sekali menggunakan kata kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pelajar sehingga ini yang menjadi pemicu pada saat-saat kejadian tawuran. Dari sekian banyak penyebab tawuran di lingkungan SMK PGRI 1 Kota Serang namun yang paling dominan menurut apa yang peneliti lakukan adalah: terciptanya geng C55 yang ada di sekolah tersebut dan faktor ucapan yang tidak pantas. Penyelesaian masalah tawuran pelajar oleh pihak sekolah sudah dilakukan terus menerus, berbagai upaya preventif dan persuasif telah ditempuh namun samapai hari ini tawuran masih tetap terjadi, dalam hal ini Kepolisian sebagai lembaga pengendalian sosial sering disebut juga lembaga kontrol sosial *social control*. Lembaga ini muncul ditujukan agar pengendalian sosial berjalan efektif. Pada hakikatnya, lembaga pengendalian sosial adalah seluruh upaya yang dilakukan kelompok atau masyarakat untuk mengawasi, mengendalikan, serta menyadarkan anggotanya agar mematuhi norma norma yang berlaku. Tujuan dari lembaga pengendalian sosial adalah mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengendalikan tawuran pelajar siswa SMK PGRI 1 Kota Serang dengan upaya preventif. Upaya ini dilakukan oleh personil Binmas sebagai perwakilan Kepolisian mengadakan pembinaan dan penyuluhan disemua sekolah tingkat SLTA. Dalam upaya *preventif* terhadap kasus tawuran pelajar Kepolisian mensosialisasikan kepada para siswa seputar dampak negatif yang ditimbulkan akibat tawuran pelajar, melalui kegiatan pembina upacara disekolah-sekolah, namun upaya yang sudah di lakukan ini masih belum begitu efektif. Secara keseluruhan seringkali pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah yang sama terhadap para pelaku tawuran pelajar. diantaranya belum adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai pelajar yang melakukan

aksi tawuran, dan sarana parasarana yang kurang mendukung.

Rumusan Masalah

Masalah utama dari penelitian ini adalah peran Kepolisian Kecamatan Serang dalam upaya menangani masalah tawuran pelajar yang dilakukan oleh siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang sudah merugikan berbagai pihak baik siswa itu sendiri maupun pihak pihak yang terkena dampaknya. Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang di amanatkan oleh undang undang kepolisian yaitu menjaga ketertiban, dan keamanan harus ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan sedini mungkin terhadap aksi aksi anarkhis yang di lakukan oleh para siswa yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Apa latar belakang terjadinya tawuran pelajar di lingkungan SMK PGRI 1 Kota Serang?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah tawuran pelajar di lingkungan SMK PGRI 1 Kota Serang?
3. Apa kesulitan Kepolisian dalam mencegah tawuran di lingkungan SMK PGRI 1 Kota Serang?

Kajian Teoretis

Teori control sosial. Menurut Mutakin, dkk juga berpendapat “bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (kontrol sosial)”. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan sosial adalah: proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi norma dan nilai Berdasarkan Teori Intergrasi Sosial Durkheim Emile (2010) dalam <http://polseктаumbulharjo.blogspot.com>. bahwa para pelajar ini mempunyai suatu tingkat keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka, yang disebutnya

integrasi sosial. Begitu bergabung dengan teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya. Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi/berintegrasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks di sini berarti adanya keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan semua rangsang dari lingkungan yang makin lama makin beragam dan banyak. Situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. *Teori Differential Association Theory*. Menurut Sutherland dalam Anwar, Yesmil dan Adang. (2013:78). memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.

Penelitian Terdahulu

Dari penelitian sebelumnya Hartono (2009:114) dari Universitas Diponegoro dalam tesisnya yang berjudul “Kebijakan penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang”. Memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Penyidikan Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polwiltabes Semarang dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah: Terbatasnya jumlah personil Binamitra dan Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Upaya polwiltabes Semarang dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana anak dilakukan dengan cara-cara memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan POLRI tentang perlindungan anak Adanya pemahaman penyidik mengenai diversi dan diskresi akan menambah pengetahuan Dari penelitian tesis sebelumnya Juardi dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2012 dalam Tesisnya yang berjudul “Usaha bimbingan konseling dalam menanggulangi

perkelahian antara pelajar (tawuran) di kota Cirebon”. Memberikan kesimpulan sebagai berikut: terjadinya perkelahian antara pelajar, bersumber dari berbagai factor, individu, keluarga, dan masyarakat. faktor individu meliputi aspek umur, pendidikan dan psiko patologi. Sedangkan faktor lingkungan meliputi aspek pengaruh teman sebaya dan keadaan lingkungan tempat tinggal. Ketiga faktor penyebab tersebut, yang paling berperan adalah faktor keluarga. Bimbingan yang dilaksanakan meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karier, dan bimbingan sosia pribadi emosiaonal. Keterpaduan anggota team konselor, akan berpengaruh pada proses pemberian bantuan, proses bimbingan dan konseling lebih banyak bersifat pemberian nasehat saja dan sering hanya bertindak bila sudah terjadi. Hal ini bisa menimbulkan salah persepsi pada para pelajar, sehingga menganggap para petugas bimbingan itu hanya sebagai “polisi sekolah saja. Dari hasil penelitian terdahulu yang di tulis oleh Muhammad Alamsyah dan Nurjanah, M.Si di tulis tahun 2012 (www.alam_xbening@yahoo.co.id). “Strategi Komunikasi Persuasif Guru Dalam Mencegah tawuran pelajar di SMK Negeri 1 Bukit tinggi. Dalam Jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan: Strategi komunikasi guru dalam mencegah tawuran antar pelajar di SMK Negeri 1 Bukittinggi merupakan proses yang tidak mudah. Strategi komunikasi persuasif yang dilakukan antara lain pendekatan emosional dan kognitif, strategi persuasi sosiokultural, diskusi, penggunaan saluran dan media, menjalin kerja sama dengan pihak luar sekolah, dan pemberian sanksi atau hukuman. Strategi komunikasi persuasif yang dilakukan guru dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar yang melibatkan siswa SMK Negeri 1 Bukittinggi dapat tercapai, hal ini terbukti dengan adanya perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik dan tidak adanya kasus tawuran lagi sejak terakhir kali terjadi sampai sekarang.

Kerangka Berfikir

Tawuran pelajar merupakan maslah social yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang harus dicari solusianya.

Dampak yang timbulkan akibat tawuran pelajar ini jelas tidak hanya merugikan para pelaku tawuran itu sendiri tetapi banyak pihak-pihak yang terkena dampaknya. Diperlukan peranan Kepolisian sebagai salah satu lembaga control social untuk meningkatkan upaya dalam menyelesaikan masalah tawuran pelajar. Dari peran dan upaya yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir masalah tawuran pelajar dan berpengaruh baik bagi pemerintah, dunia pendidikan, peserta didik dan masyarakat.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif yaitu cara atau prosedur pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya. Proses dan makna dari sudut pandang subjek dalam pendekatan kualitatif ditonjolkan penetapan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti ingin mengemukakan fenomena-fenomena yang ada tanpa rekayasa. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini berusaha mengkaitkan kasus yang ada yaitu peran kepolisian dalam upaya mengatasi tawuran pelajar di SMK PGRI 1 Kota Serang Sumber data penelitian ini adalah (1) informan: diantaranya Kapolsek dan Babinkamtibmas kemudian dari pihak sekolah diantaranya guru BK, pembina kesiswaan, guru agama dan beberapa orang siswa SMK PGRI 1 Kota Serang. (2) dokumentasi: arsip, rekaman dan foto-foto. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah (a) Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan; Kapolsek Kecamatan Kota Serang AKP Syahril Minda, bapak Bripda Ito selaku Babinkamtibmas, kemudian peneliti juga mewawancarai beberapa orang dari pihak sekolah diantaranya: Ibu Eva Ivana, SPd selaku guru BP, Bapak Ishak, S.Pd, selaku Pembina kesiswaan, Ibu Nurhasanah, S.Ag selaku guru pendidikan Agama Islam, dan beberapa orang siswa yang pernah terlibat tawuran pelajar. (b) observasi, hal ini dilakukan untuk mengetahui kronologi, realita dan model penyelesaian tawuran pelajar antar siswa SMK PGRI 1

Kota Serang dengan siswa sekolah lain yang ada di sekitarnya c) dokumentasi untuk mendapatkan data tentang profil sekolah, lampiran foto-foto ataupun data-data kronologi, realita dan model penyelesaian tawuran Kegiatan analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992:21-22) dan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Reduksi data. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh di lapangan (data mentah) berupa hasil wawancara para subjek penelitian dan pengamatan secara langsung di SMK PGRI 1 Kota Serang dengan siswa sekolah lain yang ada di sekitarnya, dan Polsek Kecamatan Kota Serang, Data atau informasi tersebut dipilah, dirangkum dan disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data; (2) Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk teks narasi atau uraian yang menyerupai cerita. Bentuk narasi tersebut dimulai dari langkah awal penelitian sampai peneliti mengakhiri kegiatan penelitiannya; (3) Menarik kesimpulan. dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat makna dari setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

Pembahasan

Latar belakang terjadinya tawuran pelajar di lingkungan SMK PGRI 1 Kota Serang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia. "Tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Sedangkan menurut Ridwan tawuran pelajar didefinisikan sebagai perkelahian masal yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap sekelompok siswa lainnya dari sekolah yang berbeda. Perkelahian massal seperti tawuran pelajar dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti atau

melukai siswa dari sekolah lain yang menjadi targetnya. Tawuran pelajar yang terjadi di SMK PGRI 1 Kota Serang disebabkan oleh beberapa faktor, secara garis besar faktor interen dan eksteren. Factor interen diantaranya faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan (Wilis, Sofyan S.2013) dari data yang peneliti dapatkan bahwa siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang melakukan aksi tawuran pelajar disebabkan lemahnya kemampuan untuk mengontrol segala tindakan pribadinya yang menyimpang, dampaknya tidak mampu dalam mengontrol emosi terutama emosi marah yang berlebihan, dari situlah pada akhirnya timbul keinginan untuk melampiaskannya dalam suatu bentuk tindakan menyakiti orang lain yang dianggap sebagai lawan dengan beberapa cara mengejek, memprovokasi bahkan sampai melukai fisik sehingga para siswa yang menjadi sasaran perlakuan tersebut melakukan perlawanan dengan alasan mempertahankan nama baik sekolah. Faktor eksteren yang terjadi pada siswa SMK PGRI 1 Kota Serang diantaranya: sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono Kartini (2008:60) mengatakan bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi *kompensatotis* dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. dalam hal ini aksi tawuran yang di lakukan oleh siswa SMK PGRI I Kota Serang juga akibat kegagalan peran orang tua yang tidak dapat dijadikan sebagai teladan yang baik bagi anak-anaknya. Tawuran pelajar yang terjadi di SMK PGRI 1 Kota Serang juga di sebabkan oleh konflik dalam teori konflik Menyatakan bawa: dalam konflik diperlukan aktor-aktor untuk mendukung terjadinya konflik sosial tersebut. Selain aktor, ternyata terdapat juga skenario yang memang sengaja dibuat untuk mewujudkan konflik tersebut. Dari data yang peneliti dapatkan menemukan ada beberapa alumni ataupun senior juga berperan dalam sebuah konflik yang terjadi dengan cara

melakukan provokasi terhadap juniornya untuk melakukan aksi tawuran dengan sekolah lain yang di anggap rival tujuannya untuk mendapatkan popularitas bahkan ada kebanggaan tersendiri. Menurut Teori Differential Association dalam Narwoko, J Dwi dan Suyanto Bagong. (2014:112) menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Jadi pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Demikian halnya para siswa di SMK PGRI 1 Kota Serang seperti budaya tawuran pelajar tersebut sengaja ingin ditularkan oleh sekelompok kecil yang mengatasnamakan gang C55 secara terselubung kepada siswa yang baru masuk sekolah di SMK PGRI 1 Kota Serang. namun tawuran pelajar di SMK PGRI 1 Kota Serang juga terjadi akibat dari profokasi dari luar sekolah. Maka menurut Weber tawuran dapat dianalisis berdasarkan teori tindakan sosial menurutnya Tawuran terjadi karena dorongan atau pengaruh pihak maupun kelompok pelajar sekolah lain. Tawuran merupakan sebuah tindakan sosial yang di laksanakan pelajar antar sekolah.”. Hal ini pernah terjadi sekitar tahun 2006 para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang mendapat serangan dari para siswa sekolah lain hingga menimbulkan korban luka, dari peristiwa tersebut beberapa senior melakukan propaganda kepada para juniornya agar tidak terulang kembali, Faktor lain yang dapat memicu tawuran pelajar yang dilakukan siswa SMK PGRI 1 Kota Serang diakibatkan oleh penyimpangan karakter. Oleh karena itu menurut Wiyani, Novan Ardi. (2012:12) bahwa sudah semestinya pendidikan karakter termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya pendidikan karakter di SMK PGRI 1 Kota Serang selama ini baru menyentuh pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari Penanaman nilai-nilai agama yang kurang dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai di sekolah merupakan faktor penyebab kenakalan remaja

dikalangan para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang mengarah pada perbuatan anarkhis yang disalurkan melalui aksi tawuran pelajar. Hal tersebut sesuai apa yang diungkapkan Darajat,Zakiyah, (1996:113). Perlu penanaman jiwa agama yang dimulai dari rumah tangga, sejak si anak masih kecil, dengan jalan membiasakan anak kepada sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, Seperti halnya para siswa di SMK PGRI 1 Kota Serang umumnya mereka sudah menegerti tentang segala tindakan yang dilarang namun belum sampai pada penanaman jiwa agama yang dimulai sejak masa anak-anak akibatnya banyak berpengaruh pada perilaku remaja yang bententangan ajaran agamanya hal ini dampaknya di bawa ke lingkungan sekolah. Berdasarkan informasi yang didapat dari responden tentang faktor-faktor terjadinya aksi tawuran pelajar yang terjadi di SMK PGRI 1 Kota Serang. sekolah berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan aksi tawuran pelajar yang di lakukan oleh beberapa siswa tersebut. Upaya yang dilakukan sekolah tentunya meliputi beberapa aspek seperti :mensosialisasikan tatatertib sekolah dimulai dari saat pendaftaran siswa baru dihadapan para walinya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis hingga ada penandatanganan di atas materai sebagai bentuk keomitmen para siswa dan para walinya, serta bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang sekiranya dapat membantu sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran. Tata tertib sekolah yang sudah disosialisasikan pada saat penerimaan siswa baru yang di lakukan oleh BP, setelah KBM berjalan bidang kesiswaan melanjutkan sosialisasi tersebut melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS), pada saat upacara bendera, dan melauai pamphlet-pamphlet berukuran besar yang di pasang di luar ruangan. Upaya lain yang dilaukan sekolah lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam penerimaan siswa pindahan sebab biasanya jika siawa pindahan ini berasal dari wilayah terdekat umumnya mereka pindah karna diberhentikan karna kasus, maka pihak sekolah keberatan untuk menerima. Selain itu para siswa baru juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler di luar jam KBM di sekolah untuk menghindari kegiatan yang negatif pada saat waktu luang di luar sekolah. Menurut Borneno silvia 2003 menyebutkan bahwa waktu luang yang tidak terkelola dengan baik oleh remaja dapat memunculkan perilaku yang tidak baik pada remaja. Demikian halnya para siswa di SMK PGRI 1 Kota Serang, upaya ini sudah dilakukan sejak lama oleh pihak sekolah untuk mencegah para siswa yang melakukan aksi tawuran diantaranya mendukung remaja untuk mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai sarana mengisi waktu luang. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMK PGRI 1 Kota Serang diantaranya kegiatan Pramuka PASKIBRA, WAPALAPA, Selain itu upaya yang dilakukan mengatasi tawuran pelajar dengan meningkatkan pengawasan terhadap semua siswa terhadap segala hal. Dalam teori “kontrol sosial” yang dikemukakan oleh Awan Mutakin,dkk.bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (kontrol sosial)”. Dari teori tersebut dapat di tarik dua kesimpulan yakni: Pengawasan sosial adalah, “proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi norma dan nilai”. Tugas para personil guru dibidang kesiswaan ini lebih banyak melakukan control atau pengawasan terhadap para siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah pada saat jam KBM berlangsung. Peran Kepolisian dalam mencegah tawuran pelajar di lingkungan SMK PGRI 1 Kota Serang. Kepolisian Kecamatan Kota Serang sebagai institusi Negara berperan menjaga keamanan dan ketertiban diwilayahnya sekaligus berfungsi sebagai lembaga pengendalian sosial yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat sekitar yang di dalamnya para para remaja yang berstatus pelajar. Dalam kehidupan remaja di wilayah Kota Serang adakalanya melakukan penyimpangan

sosial salah satunya melakukan aksi tawuran pelajar, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pengawasan yang terencana salah satunya dari institusi kepolisian menurut Mutakin bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya Pengawasan sosial baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi norma dan nilai. Akibat dari aksi mereka seringkali menimbulkan kerugian tidak hanya menimpa pelaku tawuran saja, tetapi orang lain yang tidak tau menau tentang urusan mereka juga terkena imbasnya seperti kerusakan baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi sehingga masyarakat merasa terganggu dengan ketertiban dan keamanannya inilah alasan Polsek Kecamatan Kota Serang harus ikut berupaya membantu pihak sekolah menangani masalah tawuran pelajar, karna sudah menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharnya keamanan. Penanganan tawuran pelajar yang dilakukan oleh kepolisian berupa tindakan preventif dan tindakan represif, upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan pendekatan untuk lebih mengenal dan mengetahui faktor- faktor penyebab dari tawuran pelajar yang dilakukan beberapa siswa SMK PGRI 1 Kota Serang melalui personil Babinkamtibmas mengadakan pembinaan dan penyuluhan di sekolah SLTA. yang intinya mensosialisasikan kepada para siswa seputar dampak negatif yang ditimbulkannya akibat tawuran pelajar, pada saat upacara bendera. Selain itu dalam kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS). Melalui Polmas membuat peta kerawanan yang berkaitan dengan masalah kenakalan remaja, melakukan patroli disekitar lokasi yang rawan terjadinya tawuran pada saat jam-jam sibuk KBM atau

pada saat mereka jam pulang sekolah, Dalam kegiatan patroli Polisi akan membubarkan kumpulan para siswa yang berada di lokasi untuk mencegah potensi tawuran, Tidak sampai di situ upaya kepolisian Kecamatan Kota Serang juga mengajak warga sekitar untuk mau berpartisipasi mencegah dan menanggulangi tawuran pelajar dengan memberikan informasi sedini mungkin terhadap kegiatan dan tempat berkumpulnya para pelajar dengan membubarkan para pelajar yang berpotensi tawuran. Langkah kedua yang di lakukan Polsek Kecamatan Kota Serang dalam Pengendalian masalah tawuran pelajar siswa SMK PGRI 1 Kota Serang dengan melakukan tindakan represif. Sebagai acuan untuk bertindak berdasarkan Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut, Kepolisian mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan- peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian kecamatan Kota Serang agar aksi tawuran pelajar tidak teulang kembali, namun pada kenyataannya masih ada saja yang luput dari pantauwan kepolisian di dilapangan, seperti penyerangan ke SMKN 2 Pandegelang, SMKN Cikande, dan Sekolah yang ada di kawasan Balaraja. Oleh karena itu ketika ada laporan dari manapun melihat para siswa yang dicurigai akan melakukan aksi tawuran, kami akan menerima laporan tersebut, untuk selanjutnya berkoordinasi kepada pimpinan Polsek untuk mengambil langkah yang diperlukan Pertama akan menurunkan dua orang personil untuk melihat situasi dan kondisi dilapangan baru memutuskan apakah masih diperlukan ada penambahan jumlah personil atau tidak, jika memang

teridentifikasi jumlah siswa yang akan melakukan tawuran jumlahnya cukup banyak maka dapat dipastikan akan menambah jumlah personil yang kami miliki bila itu masih tidak memadai maka akan berkoordinasi untuk meminta bantuan personil ke Polres. Jadi jumlah personil yang kami terjunkan di lapangan tentunya akan dikondisikan dengan situasi dilapangan, Pada pengamanan tawuran pelajar tersebut kami sering mengamankan pelajar-pelajar yang membawa senjata tajam dan hendak berkelahi. Namun jika laporan yang kami terima sedang terjadi maka penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa tindakan represif yaitu Polisi membubarkan para pelajar yang berada di lokasi tawuran selanjutnya mengamankan para siswa yang terlibat kasus tawuran, mengamankan barang bukti yang ditemukan dan apabila terdapat korban yang terluka kami mengantarkannya ke rumahsakit. Kami mendata setiap pelajar yang terlibat kasus tawuran tersebut kemudian menghubungi pihak sekolah serta orang tua pelajar yang bersangkutan. Pelajar yang bersangkutan belum akan kami bebaskan sebelum guru atau orang tuanya datang menjemput. Sarjono Soekanto dalam Narwoko, J Dwi dan Suyanto Bagong. (2014:132). Yang dimaksud dengan pengendalian sosial suatu proses baik yang direncanakan atau tidak di rencanakan yang bertujuan untuk mengajak membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku. Sejalan dengan teori tersebut dari beberapa siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang pernah melakukan tawuran dan berhasil kami amankan di wilayah Polsek Kecamatan Kota Serang masih ada wajah-wajah lama yang dulu pernah tertangkap tangan tapi jumlahnya tidak banyak, padahal mereka sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di hadapan kepolisian, sekolah dan orang tua mereka. Tapi kebanyakan siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang dapat kami amankan para siswa baru yang diajak oleh para seniornya untuk melakukan aksi tawuran dengan sekolah yang ia tuju. Ada beberapa siswa yang pernah tertangkap tangan oleh pihak

kepolisian pada saat melakukan tawuran pelajar dan diselesaikan di kantor Kepolisian Kecamatan Kota Serang dengan memanggil pihak orang tua dan pihak sekolah untuk di nasehati dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama. Ternyata upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut di nilai oleh beberapa siswa merasa tidak ada yang perlu ditakuti dari kepolisian walaupun mereka bisa menangkap tangan pada saat tawuran terjadi tapi tidak pernah di penjara walaupun kedapatan membawa senjata tajam ataupun ada yang terluka. Pihak sekolah sudah sering meminta kepada pihak Kepolisian Kecamatan Kota Serang untuk mengambil tindakan represif berupa penahanan satu sampai tiga hari kepada para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang tertangkap tangan untuk kedua kalinya dan seterusnya yang melakukan tawuran, bahkan pihak sekolah berani membiayai semua akomodasi selama di tahanan, dengan harapan dari penahanan tersebut ada efek jera untuk tidak mengulangi kembali. Kasus tawuran pelajar tidak selalu dilakukan penahanan atau melaksanakan proses penyidikan, tetapi juga dapat dengan memberikan tindakan seperti membuat surat pernyataan atau dengan tindakan hukuman seperti membotaki rambut pelajar yang melakukan tawuran. Akan tetapi apabila tawuran pelajar sudah mengarah kepada tindak pidana seperti penganiayaan, yang menimbulkan korban fisik terjadi di antara kedua belah pihak yang menyebabkan luka- luka, kesakitan dan penderitaan sehingga ada pihak yang dirugikan maka upaya Polsek Kecamatan Kota Serang akan mengambil tindakan represif dengan mengamankan kedua belah pihak yang sama-sama melakukan aksi tawuran, untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Langkah Selanjutnya dalam kasus tersebut polsek kecamatan kota Serang menyerahkan kepada keluarga korban mengenai tindakan yang diinginkan diantaranya jalan damai atau jalur hukum. Penyelesaian secara damai berarti keluarga korban merelakan yang telah terjadi tetapi apabila keluarga korban berkeberatan dapat mengajukan kepada Polwiltabes agar kasus

kenakalan remaja tersebut diproses lebih lanjut supaya pelaku dapat dijatuhi sanksi hokum atau sanksi pidana. Namun jika upaya tersebut tidak bias dilakukan maka, akan diproses melalui undang-undang diversi atau *restorative justice*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah diatur tentang diversi. Diversi di sini merupakan salah satu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Langkah ini ditempuh karna para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang melakukan aksi tawuran masih berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah yang masih berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Proses diversi dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Korban dan keluarga korban. Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut penting sekali.Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal koban adalah pihak yang telibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Pelaku dan keluarganya.Pelaku dan keluarganya adalah pihak yang mutlak dilibatkan karena keluarga pelaku karena usia pelaku yang belum dewasa (anak). Keterlibatan keluarga pelaku dianggap sangat penting karena keluarga menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan kompensasi lainnya. Wakil masyarakat.Wakil masyarakat ini sangat penting mewakili kepentingan dari lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi.Tujuannya agar kepentingan- kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan

keputusan. Kesulitan yang dihadapi Polsek Kecamatan Kota Serang Faktor interen Menurut Raharjo, (2002:104) Kesulitan lain yang dialami Kepolisian di Indonesia secara umum adalah: sangat terkenal perbandingan jumlah polisi terhadap penduduk yang amat timpang, Bagaimanapun keinginan kita untuk menambah jumlah Polisi, tetapi akhirnya akan terbentur pada banyak kendala birokrasi dan keuangan. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana tawuran pelajar yang dilakukan oleh beberapa siswa diantaranya: (1). terbatasnya jumlah personil yang dimiliki Kapolsek Kecamatan Kota Serang, seperti personil Babinkamtibmas yang bertugas melaksanakan penyuluhan dan pendekatan kepada siswa yang ada di sekolah dan kekurangan personil lainnya seperti yang menangani lalu lintas, dan reserse. (2). Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti dari kesediaan inventaris kendaraan patroli yang tidak mencukupi dan keterbatasan ruangan yang dimiliki, kesemuanya itu menyebabkan lambatnya dalam penanganan kasus tawuran pelajar pada saat di tempat kejadian perkara. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Polsek kecamatan Kota Serang melakukan koordinasi dengan lintas sektoral, seperti dengan masarakat, sekolah, pemerintah, antara polsek dan Polres Serang agar tawuran pelajar dapat cegah sebelum terjadi. (3). Anggaran yang dimiliki Polsek Kecamatan Kota Serang untuk keperluan kerja sangat terbatas sehingga para personil kepolisian harus mengeluarkan anggaran pribadinya untuk mendukung upaya penanganan tawuran pelajar diwilayahnya. Untuk biaya oprasional dalam rangka kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada para siswa yang ada di kota Serang. faktor *ekstern*. sulitnya menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan tawuran pelajar sebagai akar masalah, seperti factor psikologis, faktor yang disebabkan dari keluarga, faktor kurangnya penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan karakter, yang kesemuanya akan berdampak pada prilaku kenakalan remaja salah satunya tawuran pelajar. itu diluar kewenangan Polsek Kecamatan Kota Serang, dan keadaan siswa SMK PGRI 1 Kota Serang bukan sepenuhnya

tanggung jawab kepolisian. Kesulitan pihak kepolisian dalam menangani tawuran pelajar yang dilakukan siswa SMK PGRI 1 Kota Serang akibat lemahnya sanksi hukum karena para siswa tersebut masih menyandang status sebaga pelajar, maka tindakan mereka tidak dapat dipidanakan. Menurut Nasir Jamil (2013:33-34) Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya karena memiliki kondisi kejiwaan yang labil, menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum,.Bila mengikuti perundang- undangan saat ini, maka ujung-ujungnya perbuatan tawuran akan hanya ditindak dengan mengenakan pasal 24 ayat (1) UU nomor 3 tahun 1997, yaitu dikembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh atau Undang-Undang diversi pasal 8 nomor 11 tahun 2012. Jika kita mengikuti regulasi seperti ini, akan melahirkan permasalahan baru, karena para korban akibat tawuran sering tidak dapat diselesaikan secara hukum, bahkan ada kecenderug hanya akan menimbulkan aksi balas dendam pada waktu berikutnya, Sebagai konsekuensi dari lemahnya hukum akhirnya pelajar yang tawuran dan tertangkap polisi ada peluang tidak diproses apabila tidak ditemukan barang bukti. Hal tersebut mereka pelajari dari kawan-kawannya yang pernah tertangkap atau diproses oleh polisi Pada akhirnya mereka ada kecenderungan ingin mempertahankan tradisi tawuran pelajar tersebut karena mereka beranggapan bahwa tindakan mereka masih dalam toleransi pelanggaran hukum dan mudah menghindar dengan menghilangkan atau menyamarkan barang bukti bila ditemukan sehingga rasa ketakutan terhadap sangsi hukum yang akan diterima akibat perilaku tawuran pelajar ini tidak ada atau lemah. Devie Rahmawati mengatakan, dalam <http://megapolitan.kompas.com>. selama pencegahan tawuran pelajar hanya dilakukan melalui imbauan dan penyuluhan, selama itu pula tawuran pelajar akan terus terjadi. kata Devie, kebijakan yang perlu diambil harus bersifat perombakan sistem yang lebih represif. Dengan begitu, siswa tak mungkin mewariskan kultur kekerasan kegenerasi selanjutnya."

PENUTUP

Kesimpulan

Penyebab tawuran pelajar yang dilakukan oleh siswa SMK PGRI 1 Kota Serang adalah akibat dorongan psikologis dengan pemunculan emosi marah yang dapat membuat seseorang kehilangan kontrol diri dan berperilaku agresif yang dilampiaskan kepada kelompok lain. Selain faktor psikologis lingkungan keluarga yang tidak kondusif yang berakibat pada lemahnya control sosial, sulitnya implementasi pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama kibatnya mereka tidak memiliki pondasi yang kuat untuk membentengi dari hal-hal yang negatif seperti rasa solidaritas antar kawan yang menyimpang. Para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang yang terlibat tawuran umumnya tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai pengalihan kesibukan yang positif setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Peranan Kepolisian Kecamatan Kota Serang dalam penanganan tawuran pelajar siswa SMK PGRI 1 Kota Serang. dengan memaksimalkan upaya pencegahan yang meliputi: Kerjasama lintas sektoral terutama dengan sekolah-sekolah SLTA yang sederajat melalui kegiatan upacara bendera, kegiatan MOS, dan acara-acara tertentu. untuk memberikan penyuluhan seputar kenakalan remaja yang menjurus tawuran pelajar, selain itu kerjasama dengan para orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah yang menangani ketertiban. Upaya lain yang dilakukan Kepolisian Kecamatan Kota Serang dengan melakukan operasi di tempat-tempat yang dijadikan konsentrasi berkumpulnya para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang bersama siswa sekolah lain untuk menjaring pelajar yang pada saat jam sekolah ternyata berkeliaran di tempat-tempat yang dijadikan basis. Tidak hanya sampai disitu Kepolisian Kecamatan Kota Serang juga melakukan upaya represif bila menerima laporan dari manapun tentang siswa SMK PGRI 1 kota Serang yang akan atau sedang melakukan tawuran pelajar dengan sekolah lain untuk mengagalkan dan membubarkan bila sedang terjadi, selanjutnya mengamankan para pelaku

untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, bila mana ditemukan barang bukti senjata tajam dan alat yang digunakan sebagai senjata atau ada korban fisik, maka pihak kepolisian kecamatan kota Serang menyelesaikan melalui proses diversi dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perwakilan dari sekolah dan tokoh masyarakat. Kesulitan yang dihadapi Kepolisian Kecamatan Kota Serang dalam mengatasi tawuran pelajar siswa SMK PGRI 1 Kota Serang, secara umum kurangnya sarana prasarana dan jumlah personil yang dibutuhkan, untuk menangani anak yang berurusan dengan hukum. Kesulitan lain Belum ada sangsi yang efektif untuk membuat para pelaku tawuran jera, sebab pelaku tawuran belum dapat dipindahkan sama seperti orang dewasa, pada akhirnya akan dikembalikan pada orang tua wali, dengan alasan perbuatan tersebut tergolong kenakalan remaja yang belum dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Undang-Undang diversi yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus tawuran pelajar dalam pelaksanaannya belum dapat di realisasikan sepenuhnya

Rekomendasi

Bagi sekolah hendaknya meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan kepolisian dalam melakukan pembinaan bagi siswa, khususnya siswa yang pernah dan berpotensi terlibat dalam tawuran antarpelajar. Buat SMK PGRI 1 Kota Serang hendaknya menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung remaja untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan minatnya serta lebih mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai sarana mengisi waktu luang dan meningkatkan keterampilan siswa sehingga dapat menghindarkan remaja mengisi waktu luang dengan aktivitas-aktivitas negatif yang menjurus pada tawuran pelajar. Personil Kepolisian Kecamatan Kota Serang hendaknya menambah intensitas penyuluhan-penyuluhan kepada para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang. tidak hanya ketika upacara bendera dan MOS, tapi pada kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di

sekolah.Meningkatkan patroli dan pengawasan di tempat-tempat yang menjadi basis berkumpulnya para siswa SMK PGRI 1 Kota Serang terutama pada saat-saat kegiatan belajar mengajar.Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada masalah tawuran pelajar disarankan untuk melihat faktor-faktor status sosial ekonomi para siswa yang terlibat tawuran pelajar, sosial budaya masyarakat kota Serang, dan kondisi iklim yang panas sehingga orang mudah marah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat mengembangkannya secara lebih mendalam dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Rafika Aditama
- Darajat,Zakiyah (1996). *Kesehatan Mental*Jakarta: C.V. Haji Masagung,
- Djamil Nasir (2013) *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. (2008). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto Bagong. (2014).*Sosiologi Teks Pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo Satjipto.(2002) *Polisi Sipil Dalam perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.
- Wiyani Novan Ardy (1212) *Pendidikan Karakter Berbasis Imandan Taqwa*, Yogyakarta: Teras

Jurnal

- Muhamad, Alamsyah,dan Nurjanah. (2012). *“strategi komunikasi persuasif guru dalam mencegahtawuran pelajar di SMK*

Negeri 1 Bukit Tinggi”(www.alam_xbening@yahoo.co.id)
Jurnal Muhamad Alamsyah Repository - Universitas Riau

Tesis

- Hartono, SH, (2009) *Kebijakan Pendidikan Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Zuardi. (2012). *Usaha Bimbingan Konseling Dalam Menanggulangi Perkelahian Pelajar (Studi Kasus Tawuran di kota Cirebon)*. IKIP Bandung.

Dokumen

- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.*
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.*
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Internet

- Anshori, Imam (2004). *tawuran pelajar faktasosial yang tak berkesudahan di Jakarta*<http://eprints.uny.ac.id>.
- Dahrendorf Ralf {2014} teori-konflik.<https://rumputmelawan.wordpress.com>
- Durkheim, Emile (2010) perkelahian-pelajar-sebagai-salah-satubentukkenakalan remaja.
<http://polseksaumbulharjo.blogspot.com>.
- Devie (2013) *Bagi Pelajar. Tawuran adalah Simbol Kebanggaan*
<http://megapolitan.kompas.com>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online*.<http://kbbi.web.id>.
- Mustofa, Muhammad (2012) tawuran-pelajar-penyebab-solusinya.
<http://forpromuda.blogspot.com>.

